HARIAN RAKJAT

Diterbitkan oleh :
N.V. Penerbit „Rakjat" — Pintu Besar 93 — Djakarta

Tilpon : Red. 854, Adm. 855 — Kota
Direksi : SIAUW GIOK TJHAN — ANNASI
Redaksi : NAIBAHO — TAN HWIE KIAT

Harga langganan Rp. 11.— per bulan. Langganan per pos/looper Rp. 11.50 per bulan. Tarip iklan : Rp. 0.70 p.m.m. kol minimum Rp. 10.—. Semua pembajaran dimuka. Harga Etjeran Rp. 0.50.

TADJUK RENTJANA:

TERBELAKANG

APABILA kita tjoba memperhatikan dengan teliti laporan2 tentang djalannja rapat2 parlemen selama beberapa hari belakangan ini, terutama laporan2 tentang djalannja rapat mengenai mosi K.H. Tjikwan dan kawan-kawannja serta mengenai laporan komisi penindjau peristiwa Tandjong Morawa maka terasalah setjara lebih njata pula bahwa pokok sebab terdjadinja peristiwa2 dan banjak matjam hal jang tidak memuaskan itu disebabkan karena kita ...... terbelakang dalam perundangan-undangan.

Peristiwa sematjam Tandjong Morawa dan pentraktoran tanah2 itu kelihatan tidak akan terdjadi, apabila kita sudah mempunjai undang2 tentang hak milik tanah, tentang kewarganegaraan dan penduduk jang tegas. Selandjutnja tidak akan ada mosi Tjikwan dan kawan-kawannja, apabila pemerintah kita sudah di-ikat dengan undang2 anggaran belandja, artinja anggaran belandja sudah ditetapkan sebelum masa berlakunja.

Dalam hubungan ini baik kita perhatikan, bahwa peraturan menteri keuangan dan perekonomian jang mengenai perobahan daftar golongan2 barang dengan mengenai TPI (Tambahan pembajaran import) dengan tarif jang berlainan itu mau tidak mau merobah penghasilan negara, jaitu dalam arti menambah. Tindakan tersebut diambil pada tanggal 22 Djanuari, djadi sesudah pemerintah menjampaikan pada parlemen anggaran belandja untuk tahun 1953.

Seperti diketahui menurut ketentuan didalam UUD, maka anggaran belandja harus disampaikan pada parlemen sebelum masa berlakunja dan perobahan terhadap anggaran belandja itu tidak dapat dilakukan, ketjuali dengan undang2, dalam arti harus dipermusjawaratkan terlebih dahulu dengan parlemen.

Apabila pemerintah sudah biasa bekerdja dengan terikat dengan anggaran belandja, jang ditentukan dengan undang2, maka tentunja sudah mendjadi kebiasaan pula untuk merobah, baik menambahnja atau menguranginja dengan undang2. Tidak bisa dengan peraturan bersama menteri2, maupun dengan peraturan pemerintah, jang mestinja mendjadi keputusan sidang kabinet. Tetapi karena pemerintah belum pernah bekerdja berdasarkan anggaran belandja jang ditentukan dengan undang2, maka kelihatan pemerintah merasa leluasa untuk merobah sumber penghasilan negara se-enaknja sendiri sadja, jaitu seperti terdjadi dengan putusan bersama menteri keuangan dan menteri perekonomian pada tanggal 22 Djanuari itu.

Djadi mestinja tidak ada persoalan mosi Tjikwan, apabila sudah ada anggaran belandja jang ditentukan dengan undang2, jang tentu sadja tidak dapat dirobah dengan tidak melalui undang-undang.

Dengan memandang persoalan mosi Tjikwan dari sudut ini, maka terasa anehnja pernjataan2 tidak setudju terhadap mosi itu dari fihak tertentu. Alasan jang biasa dja dikemukakan untuk menentang mosi itu jalah, bahwa peraturan perekonomian, jang mengenai tarif TPI, jang mempengaruhi harga, tidak dapat dibitjarakan setjara umum. Alasan ini kedengaran sangat aneh sekali, karena dengan alasan itu, maka tarif2 padjak dan lain-lainnja, jang mempengaruhi djuga penetapan harga, mestinja tidak dibitjarakan setjara umum. Hal demikian ini bertentangan dengan ketentuan UUD kita sendiri dan djuga bertentangan dengan kelaziman ditiap negara, jang melaksanakan sistim kabinet bertanggung djawab pada parlemen dan jang berdasarkan atas azas kedaulatan ditangan Rakjat. Tindakan menentukan sumber penghasilan negara, menentukan tarif padjak, bea, tjukai dan menentukan nilai mata uang, merupakan sebagian daripada perwudjutan kedaulatan negara. Djadi dengan sistim kedaulatan berada dalam tangan Rakjat, jang menurut ketentuan UUD pasal 1 ajat 2 dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat, maka tidak dapat segala apa jang mempengaruhi ketentuan sumber2 penghasilan negara atau anggaran belandja, ditentukan oleh pemerintah sendirian, tetapi harus bersama-sama dengan parlemen.

Dengan adanja debat mengenai peristiwa Tandjong Morawa dan mosi Tjikwan itu, diharap nanti akan mendorong parlemen dan pemerintah untuk bersama-sama mempertjepat usaha menjusul terbelakangan (achter stand) dalam perundang-undangan, jang sering menimbulkan peristiwa2 sulit dan kekaburan pengertian jang merugikan azas2 demokrasi.

Mudah-mudahanlah !

Pernjataan delegasi Sobsi di Peking

Rakjat Indonesia dengan penuh perhatian mengikuti perkembangan RRT

DJAKARTA, (Antara). — Delegasi Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (Sobsi) jg menghadiri perajaan 1 Mei dan Kongres ketudjuh dari Serikat2 Buruh Seluruh Tiongkok di Peking, sebelum meninggalkan Peking untuk mengadakan penindjauan di Tiongkok, telah mengeluarkan satu pernjataan jg menundjukkan tidak djudjurnja dan kepalsuan propaganda kaum imperialis dan pengikut2nja jang berusaha menutupi kebenaran bahwa Tiongkok telah madju dengan pesatnja. Demikian menurut NCNA dari Peking.

Kepesatan pembangunan RRT itu ditjapai walaupun embargo didjalankan terhadap Republik Rakjat Tiongkok jg sebaliknja malahan memukul industri nasional Indonesia serta perdagangannja.

Kaum buruh Indonesia dan golongan rakjat lainnja dgn penuh perhatian selalu mengikuti perdjuangan kaum buruh Tiongkok dan kaum buruh dibagian lain didunia ini, dan pertjaja, bahwa perdjuangan mereka akan menang. Kaum buruh Tiongkok dan rakjat seluruhnja telah dapat membebaskan dirinja dari tindasan Kuomintang dan tuan2 tanah dan penghidupan mereka telah mentjapai perobahan2 membaik. Mereka kini sedang melaksanakan rantjangan lima tahun, jang akan memadjukan Tiongkok sampai mendjadi satu negara jg besar. Demikian antara lain isi pernjataan delegasi Sobsi, menurut NCNA dari Peking.

Roem dimosi

DJAKARTA, (HR). — Hari Djum'at pagi ini BTI merumuskan suatu mosi tidak pertjaja terhadap beleid Menteri Dalam Negeri mr. Moh. Roem mengenai peristiwa Tg. Morawa, demikian wartawan Harian Rakjat mengabarkan.

Menurut suara2, apabila mosi itu nanti sudah dimadjukan, maka jang terang akan menjokong ialah fraksi2 golongan oposisi „kiri", sedang PNI jang djuga mentjela pentraktoran Tg. Morawa itu kabarnja masih akan „bersiasat" dengan melihat perkembangan2 terhadap mosi Tjikwan cs. dan apabila mosi Tjikwan itu akan mengakibatkan krisis Kabinet, maka dapat dipastikan PNI akan terlebih dahulu menjokong mosi BTI ini.

Fraksi Katholik kabarnja akan menolak, karena menganggap kabinet ini masih berhak meneruskan tugasnja dan Masjumi idem. Bagaimana pendapat lain2 partai belum djelas.

Pesanan CC P.K.I.

(Sambungan dari hal. 1).

Djuga Central Comite perlu menjatakan, bahwa dalam hubungan dengan tingkatan dan luasnja lapangan perdjuangan jang dihadapi oleh Partai sekarang ini, kita masih banjak mempunjai kelemahan2 pokok.

Di-mana2 massa kaum buruh, kaum tani, kaum wanita, pemuda, „kaum pengusaha, kaum kebudajaan, dsb. sudah sama" bangkit mengorganisasi diri. Tetapi organisasi2 jang sudah mereka dirikan kurang mendapat kemadjuan jang sewadjarnja karena Partai kurang bisa memberikan pimpinan jang se-baik2nja.

Di-mana2 Partai perlu mengadakan hubungan dan perundingan2 dengan berbagai partai politik lain untuk menggalang front persatuan nasional, tetapi hubungan dan perundingan2 sematjam itu masih kurang banjak bisa dilakukan atau kurang membawa hasil jang memuaskan, karena Partai belum bisa menjediakan tjukup banjak tenaga2 jang tjakap, ulet dan bidjaksana untuk mengadakan hubungan dan perundingan2 sematjam itu.

Partai perlu banjak mengadakan perundingan dengan pemerintah dan pendjabat2 pemerintah dipusat dan di-daerah2 untuk mengurus tuntutan2 Rakjat, dan Partai harus djuga membela kepentingan2 Rakjat dalam badan2 perwakilan, dipusat maupun di-daerah2 untuk mengurus tuntutan Rakjat, dan Partai harus djuga membela kepentingan2 Rakjat dalam badan2 perwakilan, dipusat maupun di-daerah2. Tetapi Partai masih kurang mempunjai tenaga2 jang tjukup militant, ulet dan berpengalaman untuk keperluan2 ini !

Pendeknja, untuk menghadapi semua lapangan perdjuangan ini, Partai masih sangat kurang mempunjai kader2 jang madju dalam ideologi dan terlatih dalam politik, jang bisa mengemukakan inisiatif dan bisa memimpin, jang bisa dalam segala keadaan mendjalankan garis umum Partai dan jang senantiasa bisa mempertinggi kesedaran politik dan tingkatan organisasi massa. Kelemahan ini bisa diatasi dalam waktu jang se-singkat2nja hanja djika pendidikan dan penjebaran adjaran2 Marx, Engels, Lenin, Stalin dan pemimpin2 Komunis lainnja diorganisasi dengan lebih giat dan lebih luas lagi.

Dalam pada itu musuh2 Rakjat sudah memusatkan usaha2nja utk. merintangi kemadjuan Partai kita. Orang2 Indonesia jang mendjadi kakitangan anti-Komunis sudah terus-menerus didatangi oleh madjikan2nja dari luarnegeri supaja memberikan keterangan2 mengenai segala gerak-langkah Partai kita dan menanjakan tjara2 bagaimana jang sudah dan akan dilakukan untuk menindas Partai kita dan gerakan Rakjat pada umumnja. Semuanja ini adalah didorong oleh nafsu untuk menimbulkan peperangan dunia jang baru.

Selandjutnja pada waktu belakangan ini, dan dapat dipastikan akan lebih hebat lagi di-waktu2 dekat jang akan datang, musuh2 Rakjat itu akan mentjoba merusak Partai kita dan barisan2 Rakjat disekeliling kita dengan mempergunakan fitnahan2 kedji mengenai sikap Partai terhadap agama.

Untuk menggagalkan segala usaha jang djahat dari kaum reaksi ini, Central Comite mengingatkan kepada segenap anggota dan seluruh Rakjat akan utjapan gurubesar kita *Stalin*, jang menjatakan : „Perdamaian akan dapat dipelihara dan dikonsolidasi djika Rakjat sendiri memperdjuangkan tjita2 memelihara perdamaian dan mempertahankannja sampai pada titik penghabisan." Maka hanja ada satu djalan jang harus kita tempuh, jaitu lebih mengeratkan dan meluaskan lagi hubungan Partai dengan massa. Karena memang kekuatan Partai kita terutama terletak didalam hubungannja jang erat dan luas dengan massa. Sedikit sadja renggang hubungan Partai dengan massa, maka sudah berarti bahaja besar bagi kedudukan Partai. Sebab djika terdjadi demikian, Partai akan dapat dipukul oleh musuh dengan sonder pembelaan dari massa, dan pukulan reaksi itu bisa berhasil.

Tetapi Partai hanja bisa memelihara hubungan jang erat dan luas dengan massa, djika seluruh anggota Partai benar2 menundjukkan keberanian, keuletan, kesetiaan dan keichlasannja dalam membela kepentingan se-hari2 daripada Rakjat banjak.

Dimana sekarang ini banjak terdjadi tindakan se-wenang2 dari fihak pemerintah dan alat2 negara jang melanggar hak2 demokrasi dari Rakjat, maka tiap2 anggota Partai harus senantiasa siap untuk menundjukkan keberanian, ketjakapan dan kebidjaksanaannja didalam memimpin dan mengorganisasi perlawanan dari massa Rakjat terhadap tindakan2 jg. melanggar hak2 demokrasi itu. Dalam hal membela hak2 demokrasi sekarang ini, setiap anggota Partai dan kaum demokrat umumnja harus bersembojan: "Tidak boleh ada satupun pelanggaran hak2 demokrasi jang terdjadi sonder protes dan perlawanan dari massa Rakjat"!

Disamping itu Central Comite perlu memperingatkan supaja segenap anggota menaruh perhatian istimewa didalam tjara bekerdja dikalangan massa Rakjat jang memeluk agama apapun djuga. Kita harus bisa tjegah tangkas dan bidjaksana menangkis segala fitnahan dari kaum kakitangan imperialis jang memperkuda agama untuk memetjahbelah persatuan Rakjat pekerdja dan hendak memisahkan Partai dari massa Rakjat jang beragama.

Aktivitet dan tjara2 bekerdja jang bisa lebih mengeratkan dan meluaskan hubungan Partai dengan massa sekarang ini lebih diperlukan lagi diwaktu kita sedang menghadapi pemilihan umum. Sungguh pemilihan umum nanti akan mendjadi batu-udjian jang akan membuktikan sampai dimana erat dan luasnja hubungan Partai dgn. massa dan sampai dimana kepertjajaan Rakjat terhadap Partai kita, jang berarti akan mendjadi ukuran sampai dimana Partai kita telah melakukan pembelaan terhadap kepentingan2 Rakjat banjak.

Central Comite kita baru sadja mengadjukan dengan lebih mendjelaskan lagi tuntutan perdjuangan Rakjat sekarang ini. Jaitu berupa program minimum untuk suatu pemerintah jang bisa dinamakan progresif dalam keadaan Indonesia seperti sekarang. Central Comite menjerukan kepada segenap anggota dan pentjinta2 PKI supaja berlomba2 membangkitkan dan mengorganisasi aksi2 massa untuk memperdjuangkan pelaksanaan itu.

Pada kesempatan peringatan ulangtahun ke-33 ini, Central Comite menjampaikan salut penghormatan kepada anggota2 dan pentjinta2 Rakjat lainnja jang telah mendahului kita karena telah gugur mendjadi korban keganasan gerombolan Darul Islam dan gerombolan2 teror lainnja, salut penghormatan kepada anggota2 dan patriot2 lainnja jg. sedang meringkuk dalam pendjara karena memperdjuangkan hapusnja undang2 jang bersifat kolonial jang melanggar hak2 demokrasi dari Rakjat. Kepada keluarga dari mereka jang telah gugur dan jang sedang meringkuk didalam pendjara, Central Comite menjatakan turut merasakan penderitaan lahir dan batin.

Pada kesempatan perajaan ulangtahun ke 33 ini, Central Comite menjampaikan salut penghormatan kepada segenap anggota dan kepada kaum buruh, kaum tani dan pentjinta2 PKI pada umumnja, jang telah turut membesarkan, melindungi dan mendjaga nama baik PKI.

Bersatulah seluruh Rakjat pekerdja dibawah pandji2 PKI!

Hidup Partai Komunis Indonesia!" Demikian pesanan tsb.

7 ANGGOTA PARLEMEN AKAN DIDENGAR KETERANGANNJA.

DJAKARTA. — Menurut keterangan kalangan jang bersangkutan, pada hari Saptu besok, ketudjuh orang anggota Parlemen jang pada waktu terdjadinja peristiwa 17 Oktober tahun 1952 jang lalu, mengalami penahanan akan didengarkan lagi keterangannja oleh pihak Djaksa Agung. Seperti diketahui ketudjuh orang anggota Parlemen jang ditahan itu pada terdjadinja peristiwa tersebut ialah masing2 Dr. Soekiman, Mr. Sasman Singodimedjo, Mr. Moh. Yamin, Sjamsuddin St. Makmur, Bebasa Daeng Lalo dan A.B.M. Jusuf.

KABINET YOSHIDA KE-5
sebagian besar menteri2 dari kabinet jang lama.

TOKYO, (Ant.-UP) — Perdana menteri Djepang, Shigeru Yoshida, Kemis pagi ini telah selesai menjusun kabinetnja jang ke-5 sesudah perang. Para menteri dari kabinet jang baru ini akan diambil sumpahnja oleh kaisar Hirohito pada sore hari ini.

Susunan kabinet Yoshida jang ke-5 ini adalah sbb : Perdana menteri : Shigeru Yoshida, Wakil perdana menteri : Taketora Ogata (lama), Perdagangan internasional & perindustrian : Kiyoshide Okano (baru), Keamanan nasional (pertahanan) : Tokutaro Kimura (lama), Kehakiman : Kon Inukai (lama), Pembangunan : Kyuichiro Totsuka (bekas menteri perburuhan), Urusan Pos : Juichiro Tsukada (baru), Pengadjaran : Shigeo Odachi (baru), Kesedjahteraan : Katsumi Yamagata (lama), Kehutanan : Shinya Uchida (baru), Pengangkutan : Mitsujiro Ishii (lama), Perburuhan: Zentaro Kosaka (baru), Luar negeri : Kazuki (lama), Keuangan : Ogasawara (bekas menteri perdagangan internasional dan perindustrian), Menteri2 negara : Bamboku Ohno, bekas ketua madjelis rendah, Hidjiro Ohnogi (lama), Masazumi Ando (baru), Kepala sekretariat kabinet : Kenji Fukunaga.

Sebagian besar dari pada menteri ini adalah anggota kabinet jang lama.

DEMONSTRASI DI DJEPANG
Menuntut cease-fire di Korea.

TOKYO, (Ant.-UP). — Dengan mengibarkan pandji2 Korea Utara, kira2 3.000 orang pada hari Kemis ini mengadakan demonstrasi di Tokyo untuk menuntut segera diadakannja penghentian tembak-menembak di Korea. Polisi dengan keras mengawasi gerak-gerik kaum demonstran, sedangkan tempat2 berbahaja disepandjang djarak jang dilalui oleh demonstrasi itu didjaga keras.

Achirnja kaum demonstran tersebut mengadakan rapat disebuah taman dimuka istana kaisar Hirohito dan mengambil resolusi jang menuntut segera dibentikannja pertempuran2 di Korea dan menuduh pemerintah Djepang telah mengirimkan kesatuan2 bersendjata Djepang di Korea untuk kepentingan Korea Selatan.

Resolusi2 tersebut akan disampaikan kepada parlemen, kementerian luar negeri, kementerian kehakiman dan misi diplomatik Korea Selatan di Tokyo.

Politik tanah menteri Masjumi dikerojok

(Sambungan dari hal. 1)

Beleid Gubernur Hakim : Ketegangan, kekerasan dan „kedermawanan".

Selandjutnja anggauta Sarwono dari PKI menamakan beleid politik Gubernur Abd. Hakim dalam menghadapi penjelesaian soal2 tanah di Sumatera itu sebagai suatu jang didasarkan atas ketegangan, kekerasan dan „kedermawanan".

Gubernur Hakim tak pernah adakan kontak.

Jang dinamakan politik ketegangan oleh Sarwono jalah kenjataan bahwa Gubernur Abd. Hakim belum pernah mengadakan kontak dengan majoritet tani jang berkepentingan dan tersangkut dalam soal agraria itu, bahkan usaha pihak majoritet untuk berunding hanja di sambut dengan pemberian keterangan2 informatoris sadja, tak ada sifat2 pengundjukan djalan penjelesaian.

Intimidasi dan terror.

Politik „kekerasan" menurut Sarwono berupa intimidasi dan teror, misalnja mengantjam petani2 jang tjoba memberikan keterangan2 djudjur kepada para penindjau Parlementer jg. disusul dengan penangkapan2 walaupun benar belakangan mereka jang ditangkap itu dibebaskan.

Sarwono mengakui bahwa pedoman2 pemerintah memang dapat dianggap baik dan sempurna, tapi ternjata pedoman2 itu tidak didjalankan diwaktu mengambil tindakan2.

„Kedermawanan" atau..?

Dan politik „kedermawanan" menurut Sarwono adalah tjara2 memberikan sumbangan, misalnja kepada organisasi tani „BTI-Purnama" jang meminta Rp. 30.000.— dengan suatu djandji, bahwa organisasi itu (Purnama) akan membawa anggautanja buat tunduk kepada keputusan2 dan segala sesuatu jg. akan didjalankan pemerintah. Ini hanja satu tjontoh bagaimana dipergunakannja uang untuk mempengaruhi dan memetjah belah organisasi2 tani.

Kartering harus ditindjau kembali.

Kemudian seperti Sumartojo dari PSI, Sarwono pun menganjurkan pemerintah menindjau kembali kaartering jang disiapkan oleh kepala Kantor Balai Bumi jaitu ir. v/d Waal jang tjara bekerdjanja hanja dengan duduk dibelakang medja tulisnja, sonder mengadakan penindjauan2 dan kemudian dilaksanakan dengan sonder pardon lagi, walaupun timbulkan reaksi.

Selandjutnja mengenai pemandangan Sumartojo dapat ditambahkan bahwa pada kesimpulan pemandangannja itu dikemukakan supaja soal tanah itu ditindjau dari sudut sosial ekonomis sebagai soal jang pokok dan diandjurkan perundingan kembali dengan petani untuk menindjau kaartering jg disiapkan ir. v/d Waal seperti tsb. dibagian atas dari berita ini.

Suara lain2 anggauta.

Mengenai pendapat2 beberapa anggauta lainnja adalah sbb.:

Sundjoto (Parindra) tidak memadjukan pendapat tapi bertanja, apakah akibat peristiwa Tg. Morawa dalam hal pembagian tanah, semakin lantjar pelaksanaannja ataukah semakin sulit.?

Abdullah Jusuf (PNI) berpendapat, bahwa reaksi para petani bukanlah tidak mau pindah, tetapi tidak menjetudjui sistim pembagian itu. Menurut pendapatnja, dengan adanja laporan2 jang bertentangan satu sama lain tentang Tg. Morawa, jang penting bukanlah soal mana benar dan mana jang salah, tetapi ialah tentang tidak tjakapnja gubernur Sumatera Utara jang dalam usaha pentraktoran 6 ha tanah sadja telah mengakibatkan kematian 4 orang.

J. P. Snel (PRN) mengeritik, bahwa dalam pelaksanaan pembagian tanah di Sumatera Timur dilakukan djuga discriminatie antara warga negara asli dan bukan asli.

Moch. Noeh (Demokrat) memperingatkan kepada Pemerintah dan pada pelapor, bahwa dalam masaalah pembagian tanah di Sumatera Timur itu tidak disinggung2 tentang hukum adat mengenai hak2 rakjat atas tanah jang djuga dimasukkan dalam akte konsesi sedjak 1877. Menurut pembitjara dalam pembagian sekarang ini hak2 tsb. ditiadakan oleh surat gubernur kepada pihak perkebunan, padahal revolusi politik jang dialami oleh Indonesia belum dapat mengubah hukum adat atas tanah itu. Dengan demikian, menurut pembitjara, pelaksanaan pembagian tanah di Sumatera Timur mentjabut hak2 tsb. jang ada pada penduduk asli, jakni penduduk Simelungun dan Karo dengan tiada perbedaan apakah mereka itu petani, buruh pedagang.

Ng. Meljala (Demokrat) pada prinsipnja berpendapat sama dengan Moch Noeh, hanja ia tambahkan pula, bahwa suku Melaju pun termasuk penduduk asli. Ia minta supaja hak2 menurut hukum adat itu djangan dihapuskan.

Yunan Nasution (Masjumi) pun berpendapat, bahwa laporan melupakan soal2 jang pokok. Menurut pembitjara gubernur Sumatera Utara praktis hanja melaksanakan persetudjuan antara DPV dan Menteri Dalam Negeri mr. Iskak. Selandjutnja pembitjara menjebut, bahwa menurut recapitulatie dalam pelaporan itu diterangkan dari pemindahan 30.000 penduduk sudah sebagian besar jang hampir selesai, jang telah dipindahkan 9.000, jang sedang pindah 8.000 dan hakekatnja jang suka dipindahkan 23.000.

Mengenai Tg. Morawa pembitjara berpendapat, bahwa keleluasaan jang diberikan Pemerintah kepada kelamin2 Tionghoa jang harus pindah itu sudah tjukup dan dalam hal ini menurut pembitjara Pemerintah harus mendjaga prestigenja. Yunan bertanja kepada para pelapor terhadap kesimpulannja sbb.: 1. apakah arti tidak menjetudjui sistim pembagian, apakah jang dimaksud ialah kaartering. 2. apa arti factor2 psychologisch ?

Siasat bulus ALS d.l.l. :

Massa onslag dan kerdja dulu, baru berunding soal upah

Perdjoangan Buruh perkebunan meliputi nasib 1.500.000. djiwa

Sarbupri akan beraksi utk membela nasib

DJAKARTA, (HR) — Sesudahnja semendjak bulan April Sarbupri mengemukakan tuntutan2nja untuk membaharui persetudjuan tahun '50, maka selama diadakan usaha2 mengadakan penjelesaian setjara damai, baik dengan pengiriman2 delegasi ke ALS-ZWSS-Bebto dan PPN, maupun dengan pertukaran2 nota, ternjata usaha2 itu tidak membawa hasil seperti jg diharapkan oleh buruh perkebunan untuk memperbaiki nasib hidupnja.

Kemis malam dalam pertemuan dimuka pers dan jang dikundjungi oleh wakil2 Kaum Buruh, Partai2 Politik dan orang2 terkemuka Sekr. Umum DPP Sarbupri Suhaimi Rockman menjatakan dalam penutup uraiannja: „Oleh karena pendirian2 ALS-PPN dll tidak lajak, maka dengan ini kami tolak dan Sarbupri menjatakan akan mengadakan aksi". Mendjawab pertanjaan tertulis dari wartawan kita bagaimana bentuk aksi tsb. dinjatakan bahwa hal ini akan dilakukan menurut perkembangannja nanti dan sesuai dengan undang2 darurat nomer 16.

Kenaikan harga 3 kali lipat. Buruh hanja menuntut upah minimum Rp. 5.—

Sebelumnja kaum Buruh Perkebunan memulai aksi2 umum hari Kemis malam dengan mengambil tempat dirumah makan Terry dimuka wakil2 kaum Buruh, Partai2 Politik dan orang2 terkemuka jang non Partai, oleh Sekr. Umum DPP Sarbupri dikemukakan alasan2 mengapa kaum Buruh mendjalankan tuntutan2 baru.

Oleh Suhaimi diterangkan bahwa pada tahun jang lampau sudah diadakan persetudjuan antara Buruh Perkebunan dengan modal asing. Ketika itu, sebelumnja ada aksi kaum Buruh perkebunan pada tahun '50, ada buruh jang gadji hariannja Rp. 0,85. Berdasarkan persetudjuan tsb. kemudian ditjapai minimum loon paling sedikit Rp. 3.—

Tetapi keadaan sekarang sudah lain, kebutuhan2 hidup naik terus. Untuk membaharui perdjandjian dan memperbaiki nasib Buruh tsb., kata Suhaimi, maka dimadjukan tuntutan2 oleh Sarbupri kepada ALS-ZWSS-Bebto dan PPN. Kenaikan upah dari Rp. 3.— mendjadi Rp. 5.—, tjatu tjuma2 mengenai beras, garam, pakaian dll. dan tundjangan Hari Raja. Ia menerangkan bahwa menurut statistik2 jang didapat dari pemerintah sendiri maka seharusnja kaum Buruh hidupnja minimal setiap bulannja harus membutuhkan beaja Rp. 639,50. Suhaimi mengingatkan angka2 index Pemerintah jang dibandingkan dengan gadji Buruh perkebunan sebelumnja perang Rp. 0,35, maka sekarang seharusnja kaum Buruh menerima berdasarkan kenaikan angka2 index tsb. Rp. 0,35 kali 35, artinja sehari Rp. 12,25. Tetapi dalam hal ini, tuntutan Buruh Perkebunan dan minimum loon Rp. 5.— tidak diterima madjikan. Ia menegaskan pula bahwa banjak persetudjuan tahun '50 jang tidak dilaksanakan karena di-intepretir oleh ondernemers2 didaerah setjara berbeda.

„Upah minimum Rp. 3 menurut persetudjuan th jang lampau, pada hakekatnja banjak jang tidak dilaksanakan oleh ondernemers asing, karena banjak dari kalangan mereka merobah pekerdja harian dgn upah Rp. 3, mendjadi pekerdjaan borongan jang akibatnja merobah minimum loon tadi", demikian Suhaimi. Ia djuga membantah bahwa dgn kegagalan politik karet di Kopenhagen karena „siasat Amerika tsb akan memerosotkan harga karet, dgn demikian keadaan ini dibuat alasan menolak tuntutan Buruh perkebunan. Hal ini bukan soal jang sulit kalau Pemerintah mau mendjalankan tindakan sesuai dgn politik bebasnja, jaitu berdagang dgn Negeri Eropa Timur, Sovjet Uni dan RRT.

ALS minta „rasionalisasi" dulu, baru berunding.

Sesudahnja satu setengah bulan berunding, baik dgn pengiriman2 delegasi maupun dgn pertukaran2 Nota, maka kelihatan bahwa ALS dan pengikut2nja berusaha mendengarkan tuntutan Sarbupri, malahan dalam surat2 djawabannja mengemukakan usul2 jang diluar tuntutan Sarbupri. Hal ini dibuktikan dalam suratnja pada tanggal 2 Mei jang a.l. menjatakan sbb :

1. *A.L.S. mau menerima* mengadakan perundingan so'al Tundjangan Hari Raya, kenaikan upah dan tjatu tjuma2, djika massalah werk prestasi, dan Rasionalisasi dalam Perusaha'an2 dibitjarakan terlebih dahulu; berarti A.L.S. cs. bermaksud terlebih dahulu mengadakan massaontslag atau akan mengurangi pengeluarannja.

2. *A.L.S. menghendaki* : Turut sertanja wakil2 S.B. lain dalam perundingan2; berarti A.L.S. cs. akan menghidupkan S.B.2 kuning jang bertentangan dengan bunji Persetudjuan Sarbupri/A.L.S. tahun 1950, punpula siasat memetjah belah.

3. *A.L.S. cs.* sengadja akan mengulur-ngulur waktu sehingga kita tidak ada kesempatan untuk mengadakan aksi dan sehingga waktu itu dipakai olehnja kesempatan untuk mengadakan offensiefnja di Perusaha'an2.

Dengan surat djawaban tsb. siasat ALS ialah menghindari pokok tuntutan jang sebenarnja, mengulur waktu supaja dapat mengadakan gerakan memetjah belah, dan kalau tuntutan tsb ditrima Sarbupri ini berarti Sarbupri disuruh berunding dgn Buruh perkebunan sendiri tentang pemetjatan. Sikap tsb dgn segera ditolak oleh Sarbupri jang menjatakan bahwa Sarbupri bersedia mempertimbangkan usul ALS tsb kalau tuntutan2 mutlak dari Buruh Perkebunan mengenai upah minimum, tjatu dan tundjangan Hari raja sudah mendjadi kenjataan sebagai persetudjuan.

Sikap P.P.N. mengherankan.

Dalam hal tuntutan ini, selama diadakan perundingan banjak hal2, jang mengherankan kaum Buruh, PPN jang dalam tahun jang lampau memberikan tjontoh menerima tuntutan2 kaum Buruh setjara progressif kini ternjata mendjalankan siasat mengulur2 seperti jang didjalankan oleh ALS dll modal asing. Ketika mendjawab tuntutan Sarbupri PPN di samping mengakui bahwa upah buruh perkebunan sekarang sudah tidak sesuai lagi mau merundingkan soal tundjangan Hari Raja asal kaum Buruh perkebunan tidak mengadakan tuntutan dalam tempo setahun.

Alasan bahwa keuangan Negara tidak memungkinkan djuga sukar untuk diterima, karena meskipun PPN menamakan diri Pusat Perkebunan Negara tetapi dalam kenjataannja adalah tidak selalu demikian. Sebab buruh2 jang bekerdja di PPN gadjinja tidak berdasarkan suatu bentuk jang lazim di pakai pegawai Negeri. Sebagai Pegawai „negeri" maka tahun jang lampau PPN memberikan tantiems kepada seorang pegawai jang mendjadi Adj. Direktur Rp. 83.334,39 (batja delapan puluh tiga ribu, tigaratus tiga puluh tiga ribu tigaratus tiga luh sembilan sen), kepada seorang Administrateur Rp. 40.319,81.

Djuga harus di-ingat bahwa pendjualan perkebunan Negara ini semuanja lewat modal asing keluar Negeri.

Reaksi dari luar.

Reaksi pertama dari sikap tuntutan Sarbupri ini ialah keterangan seorang non Partai Dr. Tambunan jang menjatakan bahwa berdasarkan kenaikan kebutuhan hidup maka su.

(Bersambung ke hal. 3 kol. 1)